

Journal of TOURISM AND CREATIVITY

**Prospek dan Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Jasa
Kepariwisata
(Adhiningasih Prabhawati)**

**Pembangunan Masyarakat Berbasis Pariwisata: Reorientasi dari Wisata
Rekreatif ke Wisata Kreatif
(Poerwanto SK)**

**Kolaborasi dan Kerja Sama Pengelolaan Obyek Wisata Alam: Kendala dan
Prospeknya di Era Otonomi Daerah
(Abdul Kholiq Azhari)**

**Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol
Banyuwangi
(Adetiya Prananda Putra, Tantri Wijayanti, Jimmi Sandi Prasetyo)**

**Persepsi F&B Product Terhadap Pengawasan Mutu Makanan dan Minuman
di Hotel Alam KulKul Boutique Resort Kuta Bali
(Margaretta Andini Nugroho)**

**Kerangka Teoritik Untuk Mengukur Tingkat Kapasitas Masyarakat dalam
Pembangunan Obyek Wisata
(Sunardi Purwoatmaka, Adhiningasih Prabhawati)**



TIM REDAKSI JURNAL

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata

Pimpinan Redaktur

Rebecha Prananta

Redaktur Pelaksana

Indra Perdana Wibisono

Panca Oktawirani

Pramesi Lokaprasidha

Margaretta Andini

Desain Grafis dan Fotografer

Chandra Eko Wahyudi Utomo

Kesekretariatan

Taufik Hendratno

Mitra Bestari

Darsiharjo (UPI Bandung)

Fitri Abdillah (Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International)

Asep Parantika (STP Sahid Jakarta)

Nurdin Razak (Praktisi Pariwisata)

Agus Wiyono (Praktisi Pariwisata)

Poerwanto (Konsultan Pariwisata)

Diterbitkan Oleh

Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Anggota Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI)

Alamat Redaksi

Ruang Redaksi *Journal of Tourism and Creativity* Program Studi Diploma III Usaha

Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Jember Jawa Timur 68121

Telp./Fax. 0331 – 335586

Surel: pariwisata.fisip@unej.ac.id

Laman: tourism.fisip.unej.ac.id

Kupas Redaksi

Pembangunan pariwisata di mana pun memerlukan kebijakan yang menjadi payung dari kerangka berpikir dan bertindak dalam kegiatan kepariwisataan. Dinamika pengembangan kepariwisataan di dunia telah mengalami kemajuan yang cepat. Hampir semua negara kini mengedepankan industri jasa terutama pariwisata, yang menyebabkan persaingan merebut pasar wisatawan menjadi semakin dinamis.

Bagi Indonesia yang sedang gencar membanahi industri jasa melalui pembangunan infrastruktur, memerlukan kebijakan terpadu yang mengacu pada sektor masing-masing. Dalam proses pembangunan, infrastruktur yang memadai merupakan tumpuan utama bagi distribusi pemerataan pertumbuhan perekonomian ke seluruh daerah. Pariwisata sebagai bagian dari usaha pemerataan pembangunan harus disertai dengan berbagai kebijakan yang berbasis pada berbagai kajian. Liberalisasi kepariwisataan, otonomi daerah, kapasitas masyarakat lokal, pemasaran, kualitas produk dan kreativitas merupakan bagian yang harus dibenahi secara khusus, jika ingin pariwisata menjadi sektor unggul dalam pembangunan.

Journal of Tourism and Creativity untuk terbitan kali ini menghadirkan berbagai artikel yang menyangkut Liberalisasi Jasa Kepariwisata; Pengembangan Obyek Wisata Alam di Era Otonomi Daerah; Analisis Dampak Berganda (*Multiplier Effect*) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi; Kerangka Teoritik dan kapasitas Masyarakat; Wisata Kreatif, dan dari sisi praktikum Pengawasan Mutu makanan dan Minuman. Semoga bermanfaat, dan mendorong para akademisi serta praktisi untuk berbagi pengalaman dalam bentuk tulisan pada jurnal kami.

Jember, Juli 2017
Redaksi

Prospek dan Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Jasa

DAFTAR ISI

Prospek dan Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Jasa Kepariwisataaan	85
Pembangunan Masyarakat Berbasis Pariwisata: Reorientasi dari Wisata Rekreatif ke Wisata Kreatif	105
Kolaborasi dan Kerja Sama Pengelolaan Obyek Wisata Alam: Kendala dan Prospeknya di Era Otonomi Daerah	121
Analisis Dampak Berganda (<i>Multiplier Effect</i>) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi	141
Persepsi <i>F&B Product</i> Terhadap Pengawasan Mutu Makanan dan Minuman di Hotel Alam KulKul <i>Boutique Resort</i> Kuta Bali	155
Kerangka Teoritik Untuk Mengukur Tingkat Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Obyek Wisata	169



Kata Kunci: ...

Kerangka Teoritik Untuk Mengukur Tingkat Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Obyek Wisata

Sunardi Purwaatmoko¹, Adhiningasih Prabhawati²
sunardiatmk@yahoo.com

Abstract

Investment of people capacity in local community seems to be essential for the advancement of tourism development. The income growth of the local community depends on the extent of capacity achieved by the local community. The more powerful the local community is, the more capable the local community to exploit the arrival of visitors. Viewed from community building approach, the physical development of tourism destination should be preceded by building internal capacity of the local community which includes various dimensions: community leadership, community participation, the community structure, skill and knowledges, resource mobilisation and the power of community and external supports.

Keywords: *community, capacity, development*

Abstrak

Investasi pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan pariwisata. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal sebagai akibat dari pembangunan daerah wisata akan sangat tergantung pada seberapa besar kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Semakin besar kemampuan masyarakat lokal dalam menyongsong kehadiran para wisatawan, semakin terbuka kemungkinan bagi masyarakat tersebut untuk dapat memanfaatkan kedatangan wisatawan di daerah itu. Dari sudut pandang pendekatan community building, pengembangan fisik obyek-obyek wisata harus dibarengi dengan berbagai upaya untuk pengembangan kapasitas internal masyarakat lokal yang terdiri dari berbagai dimensi, yakni: kepemimpinan komunitas, partisipasi komunitas, struktur masyarakat, skill dan pengetahuan, mobilisasi sumber-sumber dan kekuatan komunitas, dan bantuan dari luar.

Kata kunci: *masyarakat, kapasitas, pembangunan*

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNEJ

² Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNEJ

Pendahuluan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan turisme, konsep masyarakat harus dipahami sebagai jaringan potensial dari individu-individu, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang bekerjasama atau mempunyai potensi untuk bekerjasama dalam memecahkan masalah dan mencapai kepentingan dan tujuan yang sama. Dipandang dari sosiologi definisi masyarakat menggunakan dua pendekatan. Pertama, definisi itu mengasumsikan bahwa masyarakat adalah merupakan konsep teritorial, dan yang kedua menganggapnya sebagai konsep hubungan. Sebagai konsep teritorial masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan penduduk yang memiliki nama, batas-batas, tanda-tanda, tipe masyarakat dan simbol-simbol yang dapat dikenal. Sedangkan komunitas sebagai konsep hubungan mewakili penduduk yang terikat secara bersama-sama oleh jaringan komunikasi, persahabatan dan asosiasi.¹ Istilah komunitas pada umumnya didefinisikan sebagai penduduk yang dibatasi oleh batas-batas geografis, pembagian wilayah lokal, atau politik; etnisitas penduduk atau sumber-sumber atau industri yang didirikan di daerah itu. Komunitas lokal memainkan peran yang fundamental dalam kehidupan para anggotanya dalam menciptakan keamanan fisik, sosial, psikologis dan spiritual.² Definisi operasional dari konsep "komunitas" menunjuk pada suatu area geografis yang memiliki kesamaan dalam hal kondisi dan identitas diantara penduduknya dan

memuat unit-unit fungsional yang dapat digunakan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa-jasa.

Dalam pembangunan sektor pariwisata, tingkat kapasitas masyarakat yang menduduki wilayah tujuan wisatatersebut menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pariwisata menghendaki semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami bahwa investasi pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan pariwisata. Tanpa pembangunan masyarakat, kapasitas untuk melaksanakan program-program pariwisata akan menjadi sangat terbatas dan proses pembangunan pariwisata tidak akan dapat berjalan.³

Mengukur Pembangunan Kapasitas Masyarakat Lokal Melalui Pendekatan *Community Building*

Konsep pembangunan masyarakat berhubungan dengan partisipasi, pemberdayaan (*empowerment*) dan kapasitas masyarakat. Pembangunan masyarakat dapat dilihat sebagai proses pembentukan modal sosial (*social capital*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolektif. Pembangunan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan masyarakat perlu ditekankan bahwa masyarakat harus dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang terikat oleh lokasi geografis atau kepentingan bersama (*common interest*).⁴ Dalam hal ini pembangunan kapasitas

masyarakat (*CCB=Community Capacity Building*) menjadi prasyarat untuk memperbaiki proses pembangunan sektor turisme dan meningkatkan keuntungan yang dihasilkan untuk masyarakat lokal.

Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, terdapat dua hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Pada tingkat organisasional, upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan kemampuan organisasi-organisasi masyarakat. Sedangkan pada level komunitas, perlu memfokuskan perhatian pada asosiasi-asosiasi dan hubungan antara penduduk, kelompok-kelompok masyarakat lokal dan organisasi-organisasi masyarakat lokal untuk membangun masyarakat yang bersangkutan. Kapasitas masyarakat dapat diukur melalui kemampuannya dalam memobilisasi, mengidentifikasi dan memecahkan berbagai persoalan. Kapasitas masyarakat adalah interaksi antara modal-modal yang dimiliki masyarakat, dan sumber-sumber organisasional yang ada dalam masyarakat tersebut yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kolektif dan memperbaiki masyarakat itu.⁵ Dengan demikian konsep pembangunan kapasitas komunitas (*CCB*) dianggap sebagai kemampuan penduduk dan komunitas untuk melaksanakan pekerjaan. Kemampuan penduduk dan komunitas itu berhubungan dengan faktor-faktor dan indikator-indikator penentu dalam konteks kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan. Seluruh

bagian dari komunitas itu terlibat dalam pembangunan kapasitas masyarakat. Dimensi-dimensi dari kapasitas masyarakat yang paling penting dan diperlukan untuk mencapai perubahan sistematis di dalam komunitas lokal adalah: partisipasi dan kepemimpinan, sumber-sumber yang ada dalam masyarakat, jaringan sosial dan kekuatan yang dimiliki masyarakat. Secara kolektif keempat dimensi kapasitas masyarakat itu merupakan modal sosial (*social capital*) yang melekat dalam masyarakat itu.⁶ Sedangkan menurut Aref et. al. terdapat terdapat tujuh dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas masyarakat yakni, kepemimpinan komunitas, partisipasi komunitas, struktur masyarakat, bantuan dari luar, skill dan pengetahuan, mobilisasi sumber-sumber dan kekuatan komunitas. Dimensi-dimensi itu dijelaskan secara singkat sebagai berikut:⁷

1). Kepemimpinan Komunitas dan Partisipasi Komunitas

Pemimpin-pemimpin masyarakat meningkatkan kapasitas ketika mereka dapat meyakinkan keterlibatan dari suatu jaringan anggota-anggota masyarakat yang terpisah-pisah dengan tujuan agar aktor-aktor yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sama mengambil tindakan kolektif dengan membentuk suatu kesatuan dalam memecahkan persoalan. Kepemimpinan masyarakat adalah dimensi yang penting dalam mengukur

CCB. Komunitas memerlukan pemimpin-pemimpin yang dapat menolong kelompok-kelompok lokal, pelaku bisnis, dan organisasi-organisasi yang tidak mencari laba untuk bekerja secara bersama-sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan meningkatkan kekuatan-kekuatan komunitas lokal. Dalam pendekatan kapasitas masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat memainkan peranan yang vital dalam menangani program-program dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Komunitas-komunitas lokal sama halnya dengan pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi tidak dapat mencapai keberhasilan tanpa adanya pemimpin-pemimpin yang dinamis yang bersedia dan mampu mengambil inisiatif-inisiatif. Oleh sebab itu keberhasilan komunitas lokal bergantung pada kualitas, kreativitas, dan komitmen dari kepemimpinannya dalam menangani masalah-masalah yang terjadi setiap saat.

Partisipasi masyarakat menunjuk pada komitmen penduduk dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam komunitas itu. Komitmen penduduk itu memainkan peran yang esensial dan jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup. Partisipasi masyarakat adalah salah satu dari banyak mekanisme yang dapat meningkatkan keberdayaan penduduk sehingga mampu ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan-persoalan

yang terjadi dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah juga merupakan mekanisme yang dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam kemitraan (*partnership*), pembuatan keputusan dan representasi dalam struktur-struktur masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, tidak akan ada hubungan *partnership*, tidak ada pembangunan dan tidak ada program. Oleh sebab itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan untuk melaksanakan pembangunan turisme akan berakhir pada kegagalan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat.⁸

Menurut Arnstein (1969) terdapat tiga tingkat tipologi partisipasi masyarakat. Tingkat paling atas mewakili partisipasi yang asli dalam arti bahwa masyarakat secara mandiri melakukan partisipasi tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Pengelompokan berikutnya adalah partisipasi minimum dari masyarakat. Dalam kategori ini partisipan perlu dimobilisasi, diperintahkan melalui anjuran-anjuran dengan tujuan agar timbul partisipasi masyarakat. Pada tingkat partisipasi ini, penduduk melakukan partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kategori yang pertama. Pada pada tingkat yang paling bawah mewakili kategori penduduk yang tidak berpartisipasi. Pada tingkat ini penduduk mampu berpartisipasi, akan tetapi tidak mampu mengubah program menurut kebutuhan mereka sendiri.

2). Struktur Masyarakat, Bantuan Dari Luar, Keahlian (*Skill*) dan Pengetahuan

Struktur komunitas menunjuk pada kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok kerja yang mampu mengemukakan pandangan dan bertukar informasi demi untuk mencapai kesuksesan pembangunan pariwisata. Struktur-struktur komunitas lokal itu terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok-kelompok kerja dan kelompok-kelompok pemuda. Keberadaan struktur masyarakat menunjukkan bahwa dalam masyarakat itu memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh struktur masyarakat yang ada. Dengan munculnya masalah-masalah baru pada sektor pariwisata fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh struktur-struktur masyarakat juga semakin luas. Struktur-struktur masyarakat lokal dapat menjembatani kesenjangan antara individu-individu dan organisasi-organisasi dalam komunitas masyarakat itu.

Bantuan dari luar seperti departemen-departemen pemerintah dan pemerintah daerah dapat menghubungkan komunitas-komunitas itu dan sumber-sumber yang berasal dari luar dalam pembangunan turisme. Bantuan dari luar juga dapat menyumbang penguatan organisasi komunitas yang dapat digunakan untuk memanfaatkan secara maksimal semua kesempatan yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat.

Keterbatasan dalam keahlian (*skill*) dan pengetahuan dapat

mengakibatkan bukan hanya ketidakmampuan penduduk lokal untuk berpartisipasi dalam turisme tetapi juga dominasi sektor turisme dari luar masyarakat itu. Peningkatan *skill* dan pengetahuan dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan, pejabat-pejabat pemerintah lokal, pemimpin-pemimpin dan penduduk dalam komunitas itu melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman empirik yang mereka dapatkan dari interaksi mereka dengan para wisatawan.

3). Mobilisasi Sumber-sumber dan Kekuatan Komunitas

Pembangunan kapasitas masyarakat memerlukan pemanfaatan sumber-sumber yang strategis yang dimiliki komunitas itu. Sumber-sumber yang dimiliki masyarakat dapat diakses dari berbagai sumber termasuk sektor swasta dan pemberi bantuan sukarela. Walaupun demikian, sumber-sumber finansial merupakan aspek yang penting jika dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Sumber-sumber potensial yang ada di dalam masyarakat perlu dimobilisasi agar menjadi kekuatan aktual. Semakin komunitas itu mampu dalam mengakumulasi sumber-sumber dan memanfaatkannya untuk membangun kapasitas masyarakat maka semakin besar kapasitas masyarakat yang bersangkutan, sehingga masyarakat itu mampu memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Hasil akhir terpenting dari pembangunan kapasitas masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup yang dicapai masyarakat itu. Peningkatan kapasitas

masyarakat juga dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengakses sumber-sumber yang berasal dari luar.

Ashley & Roe (1998) menjelaskan kekuatan komunitas sebagai sebuah spektrum dari keterlibatan yang pasif kemudian menuju aktif dan akhirnya berubah menjadi partisipasi yang penuh.⁹ Kekuatan yang dimiliki suatu komunitas sangat penting artinya karena dapat menolong penduduk bertindak secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk memperbaiki pembangunan masyarakat.

Dampak Pembangunan Sektor Wisata Terhadap Tingkat Pendapatan Ekonomi Komunitas Lokal

Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan dalam bidang pariwisata mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk masyarakat lokal. Walaupun demikian, dampak positif ini tidak akan dapat terwujud apabila masyarakat lokal tidak mempunyai kemampuan untuk membangun kapasitas modal sosial yang dimiliki. Dengan demikian, peningkatan pendapatan masyarakat lokal sebagai akibat dari pembangunan daerah wisata akan sangat tergantung pada seberapa besar kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Semakin besar kemampuan masyarakat lokal dalam menyongsong kehadiran para wisatawan, semakin terbuka kemungkinan bagi masyarakat

tersebut untuk dapat memanfaatkan kedatangan wisatawan di daerah itu.

Pada tingkat masyarakat lokal, pembangunan sektor turisme baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan merangsang terjadinya peningkatan pendapatan. Komunitas lokal semakin terlibat dalam turisme tidak hanya dari sisi permintaan, karena para pendatang secara aktif berusaha memilih tujuan-tujuan wisata yang baru, akan tetapi juga dari sisi *supply* atau penawaran, karena komunitas-komunitas menjadi semakin sadar akan adanya potensi berbagai produk yang dapat mereka tawarkan kepada para pengunjung dan manfaat ekonomi yang mereka.¹⁰ Turis memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembangunan masyarakat lokal melalui *business mentoring* dan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang dapat menyumbang peningkatan *skill* dan pengetahuan pada masyarakat lokal dan penduduk lokal maupun memperbaiki tingkat pendapatan ekonomi bagi komunitas lokal. Turisme semakin dipandang sebagai komponen yang penting dalam pembangunan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan.

Pada tingkat nasional, kemajuan ekonomi diukur dengan jumlah yang merupakan jumlah total aliran pendapatan dari tangan ke tangan. Para ahli ekonomi telah banyak mengetahui bahwa peningkatan peningkatan investasi baik publik maupun privat dalam ekonomi meningkatkan pendapatan nasional

yang jumlahnya lebih besar dari jumlah investasi yang ditanamkan. Para ahli ekonomi menggunakan istilah *multiplied amount* (jumlah yang berlipat lipat) karena ketika investasi itu berpindah-pindah ke tangan orang lain, investasi awal itu dikeluarkan kembali dan menghasilkan putaran pengeluaran yang baru. Dampak investasi ini disebut sebagai *multiplier effect* yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: Aning tinggal di suatu hotel yang dimiliki oleh Ana satu malam dan membayar Rp 500.000,-. Ana membelanjakan uang itu untuk membayar Warno, seorang pekerja hotel. Warno menggunakan sebagian uangnya untuk membayar Wardi, seorang penyembelih hewan ternak. Wardi membeli roti dari Tini seorang pembuat roti. Uang pertama yang dibelanjakan pemilik hotel itu, Ana, terus beredar dalam hubungan perekonomian yang menghasilkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang jika diukur dengan uang, jumlah aktivitas itu lebih dari RP. 500.000,-. uang yang di keluarkan oleh Aning sebagai jasa menginap di hotel.¹¹ Penjelasan di atas menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan swasta dalam sektor pariwisata mempunyai arti penting dalam mensukseskan pembangunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Dalam arti luas, turisme meliputi pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa oleh para pengunjung, *Travellers Check*, transportasi, penginapan, atraksi, makanan, minuman, entertainment, souvenir, rental mobil,

taksi, ojek, agen travel. Pariwisata juga berpengaruh besar dalam membangkitkan bisnis mikro. Manfaat bisnis mikro yang timbul sebagai akibat pariwisata adalah uang yang didapatkan oleh bisnis mikro cenderung beredar di dalam komunitas lokal. Mikro bisnis juga merupakan elemen yang vital dalam menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah pedesaan dan daerah-daerah yang kurang berkembang. Di banyak negara berkembang munculnya bisnis turisme telah menyediakan kesempatan bagi penduduk masyarakat lokal untuk menjadi wiraswastawan.¹²

Mengapa turisme secara ekonomi begitu penting adalah bahwa sektor itu merupakan industri padat karya (*labor intensive*). Tenaga kerja dalam industri turisme terkonsentrasi dalam sektor jasa yang cenderung *less automated* dalam arti bahwa sektor itu tidak banyak memerlukan keterampilan khusus. Oleh sebab itu investasi dalam industri pariwisata tidak memerlukan modal yang besar tapi dapat menyediakan lebih banyak kesempatan bekerja bagi kelompok komunitas lokal. Di samping itu, sektor turisme juga merupakan sektor penting yang mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil Penelitian Lapangan

Ulasan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan pembangunan kapasitas masyarakat menunjukkan bahwa hasil temuan penelitian yang mereka dapatkan bervariasi. Akan tetapi pada umumnya temuan-temuan penelitian itu

menjelaskan bahwa keberadaan partisipasi masyarakat dan kepemimpinan, sumber-sumber yang dimiliki, jaringan sosial dan kekuatan yang dimiliki komunitas berpengaruh positif terhadap pembangunan sektor turisme. Apabila elemen-elemen itu dimanfaatkan secara maksimal dan mendapat dukungan dari pemerintah sebagai *leading sektor* maka untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan sektor wisata tidak akan mendapatkan halangan yang berarti.

Pembangunan kapasitas masyarakat bersifat esensial dalam pembangunan sektor turisme. Walaupun demikian, terdapat beberapa halangan dalam mencapai pembangunan kapasitas masyarakat.¹³ Hunt (2005), menjelaskan beberapa halangan untuk mewujudkan pembangunan kapasitas masyarakat, yakni: 1) masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan turisme, 2) ketidakseimbangan kekuatan antara pemerintah dengan masyarakat lokal, 3) keterbatasan pengetahuan tentang turisme, 4) program-program pembiayaan jangka pendek. Berbeda dengan hasil survey Hunt, *the Social Policy Unit of the Western Australian Government (2004)*, menjelaskan beberapa halangan itu meliputi ketersediaan waktu yang terbatas, *skill*, keterbatasan dana, kemampuan individu dan kelompok untuk bekerja sama, sedikitnya para praktisi ahli di bidang turisme (*Social Policy Unit 2004*). Untuk memecahkan persoalan ini meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan turisme bersifat fundamental.¹⁴

Beberapa kasus lain yang terjadi di beberapa negara menyajikan beberapa analisis dengan temuan yang berbeda-beda baik negatif maupun positif. Mbaiwaet. al., dalam tulisannya yang menganalisis tentang dampak penerapan Manajemen Sumber Alam Berbasis-Komunitas terhadap tingkah laku penduduk dalam menghadapi pembangunan sektor wisata dan konservasi di delta Sungai Okavango, Botswana menjelaskan bahwa tingkah laku penduduk negatif setempat terhadap konservasi mempunyai hubungan yang erat dengan kemerosotan sumber-sumber di negara-negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan perubahan tingkah laku penduduk baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap pembangunan pariwisata dan konservasi. Perubahan tingkah laku itu dipicu oleh keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat setempat sebagai akibat dari penerapan sistem Manajemen Sumber Alam Berbasis-Komunitas, yakni menjadi *co-management* dalam manajemen sumber-sumber; dan tindakan kolektif masyarakat lokal dalam yang mana sistem Manajemen Sumber Alam Berbasis Komunitas diadopsi. Sebagai akibatnya, pengambil keputusan dari sektor publik harus memberikan prioritas utama pada penerapan Sistem Manajemen Sumber Alam Berbasis Komunitas dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan konservasi.¹⁵

Dalam studi kasus yang pertama di Turki, Tosun menjelaskan tingkah laku kelompok-kelompok kepentingan. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis jenis atau tipe partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh berbagai kelompok kepentingan di Turki. Dalam analisisnya Tosun menemukan bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang beraneka ragam mengharapkan berbagai tipe partisipasi masyarakat yang berbeda untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka sendiri yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain.¹⁶

Dalam studi yang kedua, Tosun menjelaskan beberapa tahap munculnya partisipasi masyarakat di bawah kondisi politik, sosial-ekonomi dan budaya dengan tidak mengabaikan daerah-daerah pinggiran yang ada di negara-negara maju. Tosun menjelaskan bahwa proses munculnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh tiga peristiwa: (1) ancaman eksternal dan internal terhadap pemerintah pusat yang memaksa pemerintah harus menerima, mendukung dan memfasilitasi implementasi pembangunan dengan menggunakan pendekatan pembangunan partisipasi masyarakat, (2) munculnya kemauan politik pada tingkat pusat, dan (3) kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum, restrukturisasi sistem administrasi pada tingkat operasional dan proses partisipasi. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa kemauan politik pada tingkat pusat, kepatuhan terhadap aturan-aturan

hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal dan kerja sama yang melibatkan kelompok-kelompok elit dominan bersifat esensial bagi kemunculan dan operasionalisasi menggunakan pendekatan pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan turisme.¹⁷

Studi Tosun yang pertama mengindikasikan bahwa tanpa keterlibatan pemerintah dalam sektor pariwisata yang akan terjadi adalah konflik antar kelompok kepentingan. Terbukti, dalam studi Tosun yang kedua partisipasi masyarakat dan kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi implementasi pembangunan bersifat esensial bagi kemunculan dan operasionalisasi pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan turisme. Dari hasil penelitian Mbaiwa et. al. dan Tosun dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan kapasitas masyarakat bersifat sentral. Di Botswana pemerintah harus mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Sumber Alam Berbasis-Komunitas yang intinya bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Sedangkan penelitian Tosun menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan sangat diperlukan. Terbukti ketika kolaborasi itu tidak terbentuk kelompok-kelompok kepentingan menjadi saling bertentangan.

Dipandang dari pendekatan *community building*, studi *shone* yang menitik beratkan pada analisis

perubahan implementasi kebijakan di New Zealand yang pro-kekuatan swasta yang terstruktur dalam ideologi neo-liberalisme menuju kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat semakin jelas menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah sebagai dimensi kekuatan eksternal dalam pembangunan kapasitas masyarakat lokal pada sektor turisme mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.¹⁸ Hal ini secara implisit mengindikasikan bahwa di New Zealand peranan kapasitas masyarakat lokal dalam sektor turisme lebih kecil jika dibandingkan dengan peran pemerintah karena kapasitas internal masyarakat lokal tidak mampu secara mandiri menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Abdullah et. al. dalam penelitiannya tentang *Eco-Homestay* di desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember menemukan bahwa *Eco-Homestay* dalam turisme berbasis-konservasi di daerah pedesaan dapat dicapai karena komunitas penduduk Silo mampu mengendalikan struktur pembangunan yang terintegrasi, struktur organisasional, struktur finansial, strategi pemasaran, strategi operasional dan pembangunan fisik.¹⁹

Nisa et. al. berusaha untuk mengidentifikasi potensi aktivitas petani organik sebagai ketertarikan obyek wisata *agro edutourism* di daerah Lawang, kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka menemukan bahwa pembangunan obyek wisata

berbasis *agro edutourism* telah membawa manfaat pembelajaran antara petani dan murid dalam menciptakan aktivitas kewirausahaan yang dapat dilihat melalui pencapaian prestasi yang diperoleh oleh *ekopreneur* yang dapat diukur dari dimensi sistem pasar yang efektif dan keuntungan riil yang dapat diperoleh dari upaya pengembangan *agro-ecosystem* yang sehat dan hasil-hasilnya. Kolaborasi antara petani dan murid sekolah dapat memperbaiki ketertarikan obyek wisata dan lama berkunjung bagi para wisatawan.²⁰ Studi kasus lain yang terjadi di Indonesia adalah Bali. Sebagai tujuan wisata yang utama di Indonesia, Bali memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya yang diperoleh dari sektor turisme, walaupun demikian, dalam pembangunan turisme terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus yakni, kerusakan dalam bidang pertanian dan dampak negatif turisme terhadap budaya masyarakat Bali. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk dalam membangun turisme karena dengan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan turisme, masyarakat setempat dimana sektor turisme dikembangkan mampu berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang timbul di bidang budaya dan pertanian.²¹ Keberhasilan obyek wisata di Sidomulyo dan Lawang dan Bali terkait dengan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan

obyek wisata, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan sumber-sumber, jaringan sosial dan kekuatan yang dimiliki komunitas tersebut. Ketiga kasus itu menunjukkan bahwa peran masyarakat lokal menjadi faktor terpenting dalam memecahkan berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari pembangunan sektor wisata.

Kasus di Indonesia yang terakhir adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana pengembangan warisan budaya di Yogyakarta mengintegrasikan aspek-aspek politik, teknokrasi, dan partisipasi masyarakat lokal. Dalam penelitian mereka yang berjudul "*Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model)*", Suryanti *et. al.* menemukan bahwa terdapat proses yang unik yang melibatkan kombinasi kolaboratif antara aktor-aktor politik, teknokrat, dan partisipasi masyarakat lokal yang dianalisis dengan model pendekatan *participatory*, *top down* dan *bottom up*.²² Kontribusi yang berharga dalam penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara komunitas masyarakat lokal, pemerintah, dan *NGO* (*Non-Government Organnizations*) telah berhasil dalam mewujudkan rencana pembangunan obyek wisata warisan budaya di Yogyakarta.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai studi kasus itu

adalah bahwa jika masyarakat lokal tidak mampu memanfaatkan modal sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maka kehadiran bantuan dari luar terutama pemerintah sangat diperlukan dalam upaya untuk membangun kapasitas masyarakat. Kasus yang terjadi di Bostwana dan Turki peranan bantuan dari luar bersifat sentral. Berbeda dengan kasus yang terjadi di kedua negara itu kasus yang terjadi di Lawang dan Silo, Propinsi Jawa Timur, dan Bali menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan di tingkat lokal berhasil melakukan kolaborasi dalam mengembangkan obyek turisme sehingga tidak perlu campur tangan pemerintah atau pihak lain. Sedangkan kasus di Yoyakarta kolaborasi antara komunitas masyarakat lokal, pemerintah, dan *NGO* (*Non-Government Organnizations*) telah berhasil dalam melestarikan warisan budaya di Kotagedhe.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian itu kami berargumen bahwa pembangunan kapasitas masyarakat di obyek wisata dapat dicapai jika pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam membangun kapasitas masyarakat lokal di daerah itu. Ketidakseimbangan sumber-sumber kekuatan antara pemerintah dengan masyarakat lokal di obyek wisata seringkali terjadi. Kesenjangan ini hanya dapat ditutup melalui campur tangan aktif pemerintah dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di di dalam komunitas itu.

Dari sudut pandang pendekatan *community bulding*, pengembangan fisik obyek-obyek wisata harus dibarengi dengan berbagai upaya untuk pengembangan kapasitas internal masyarakat lokal yang terdiri dari berbagai dimensi, yakni: kepemimpinan komunitas, partisipasi komunitas, struktur masyarakat, *skill* dan pengetahuan, mobilisasi sumber-sumber dan kekuatan komunitas. Gabungan antara kapasitas internal masyarakat lokal dengan kapasitas pemerintah dan kekuatan-kekuatan lain di luar pemerintah yang merupakan dimensi kapasitas eksternal, akan dapat memecahkan berbagai persoalan yang timbul sebagai akibat dari pembangunan sektor wisata sehingga akibatnya, dapat meningkatkan baik kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal maupun pendapatan daerah. Pendeknya, kolaborasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan pendapatan asli daerah, *vice versa*.

Endnote

¹Aref et. al., *Community Capacity Building for Tourism Development*, Journal of Human Ecology, 27(1): 21-25 (2009), University Putra, Malaysia, halaman 24.

²Aref et. al., *ibid*.

³Aref et. al. *Dimensions of Community Capacity Building: A review of its Implications in Tourism Development*, Marsland Press, Journal of American Science 2010;6(1).

⁴Aref et. al., *ibid*.

⁵Aref et. al., *ibid*

⁶Aref et. al., *ibid*.

⁷Aref et. al., *ibid*.

⁸Aref et. al., *ibid*.

⁹Ashley & Roe (1998), dalam Aref et al., *ibid*.

¹⁰Aref et. al., al, *Tourism Development in Local Communities: As a Community Development Approach*, Marsland Press, Journal of American Science, 2010;6(1).

¹¹Edgel, David L, 1990, *International Tourism Policy*, Van Nostrand Reinhold, New York, halaman 28

¹²Vanhove, Norbert, 2005, *The Economics of Tourism Destinations*, Amsterdam Boston Heidelberg London New York Oxford Paris San Diego San Francisco Singapore Sydney Tokyo, halaman 18- 19.

¹³Aref et. al., *op-cit*.

¹⁴Aref et. al., *ibid*.

¹⁵Mbaiwa, Joseph E. et. al., *Changes in resident attitudes towards tourism development and conservation in the Okavango Delta, Botswana*, Harry Oppenheimer Okavango Research Centre, University of Botswana, 285, Maun, Botswana, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.03.009>.

¹⁶Tosun, Cevat., *Expected nature of community participation in tourism development*, Tourism Management, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>. Juga dapat diakses di <http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177/27/3>

¹⁷Tosun, Cevat., *Stages in the emergence of a participatory tourism development approach in the Developing World*, Geoforum, Volume 36, Issue 3, May 2005, Pages 333–352, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.06.003>. juga dapat diakses di <http://www.sciencedirect.com/science/journal/00167185/76/3>

¹⁸Shone, Michael C. et. al., *Tourism, Public Policy and Regional Development: A Turn from Neo-liberalism to the New Regionalism*, Published online: 28 Oct 2008, <http://www.tandfonline.com/action/showcitormats?doi=10.1080/2690940802408011>

¹⁹Asbullah, Alvan Sidiq et. al., *Eco-Homestay: Development Concept On Rural Tourism-Based Conservation Model (Study Case of Sidomulyo Village, Silo District, Jember Regency)*, Journal of Indonesian Tourism and

Development Studies, Vol. 1 No. 3 Edisi September 2014, Website: jitode.ub.ac.id

²⁰Nisa, Ayu Raisa Khairun et. al., *Agroedutourism and Ecopreneurship Activities on the Organic Farming Practices in Lawang, Malang Regency, East Java, Indonesia*, Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 2 No. 3, September 2014, Website: jitode.ub.ac.id

²¹Sutawa, Gusti Kade, *Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development*, Procedia Economics and Finance, Volume 4, 2012, Pages 413-422, Elsevier, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356) juga dapat diakses di : <http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/4/sup/c>

²²Eko Suryanti et.al., *Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta(Management lanning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model)*, Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 2 No. 3, September 2014, Website: jitode.ub.ac.id

Daftar Pustaka

Aref et. al. *Dimensions of Community Capacity Building: A review of its Implications in Tourism Development*, Marsland Press, Journal of American Science 2010; 6(1).

Aref et. al., al, *Tourism Development in Local Communities: As a Community Development Approach*, Marsland Press, Journal of American Science, 2010; 6(1).

Aref et. al. *Community Capacity Building for Tourism Development*, Journal of Human Ecology, 27(1): 21-25 (2009), University Putra, Malaysia.

Asbullah, Alvan Sidiq et. al. , *Eco-Homestay: Development Concept On Rural Tourism-*

Based Conservation Model(Study Case of Sidomulyo Village, Silo District, Jember Regency), Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 1 No. 3 Edisi September 2014, Website: jitode.ub.ac.id

Edgel, David L, 1990, *International Tourism Policy*, Van Nostrand Reinhold, New York.

Eko Suryanti et.al., *Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta(Management lanning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model)*, Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 2 No. 3, September 2014, Website: jitode.ub.ac.id

Mbaiwa, Joseph E. et. al., *Changes in resident attitudes towards tourism development and conservation in the Okavango Delta, Botswana*, Harry Oppenheimer Okavango Research Centre, University of Botswana, 285, Maun, Botswana, <https://doi.org/10.1016/j.jenvma.n.2011.03.009>.

Nisa, Ayu Raisa Khairun et. al., *Agroedutourism and Ecopreneurship Activities on the Organic Farming Practices in Lawang, Malang Regency, East Java, Indonesia*, Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 2 No. 3, September 2014, Website: jitode.ub.ac.id

Sutawa, Gusti Kade, *Issues on Bali Tourism Development and*

Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development, Procedia Economics and Finance, Volume 4, 2012, Pages 413-422, Elsevier, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356j](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356j) juga dapat diakses di: <http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/4/sup/c>

Tosun, Cevat. , *Expected nature of community participation in tourism development*, Tourism Management, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>. Juga dapat diakses di : <http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177/27/3>

Tosun, Cevat. , *Stages in the emergence of a participatory tourism development approach in the Developing World*, Geoforum, Volume 36, Issue 3, May 2005, Pages 333-352, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.06.003>. juga dapat diakses di: <http://www.sciencedirect.com/science/journal/00167185/76/3>

Shone, Michael C. et. al. , *Tourism, Public Policy and Regional Development: A Turn from Neo-liberalism to the New Regionalism*, Published online: 28 Oct 2008, <http://www.tandfonline.com/action/showcitformats?doi=10.1080/2690940802408011>

Vanhove, Norbert, 2005, *The Economics of Tourism Destinations*, Amsterdam Boston Heidelberg London New

York Oxford Paris San Diego San Francisco Singapore Sydney Tokyo.